

## PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA GENTENG KULON

Frido Armada Kurniawan Wiratama<sup>1</sup>, Baktiawan Nusanto<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received Mei, 2025

Revised Mei, 2025

Accepted Mei, 2025

Available online Mei, 2025

[Fredoarmada1515@gmail.com](mailto:Fredoarmada1515@gmail.com),  
[baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id](mailto:baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintahan desa Genteng Kulon dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penguatan kapasitas pemerintahan Desa Genteng Kulon saat ini sudah mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan empat indikator skema AGIL dan penerapan tiga indikator teori sistem umum. Pemerintah Desa Genteng Kulon berhasil menguatkan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di Desa Genteng Kulon.

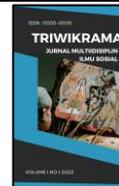
**Kata Kunci:** Kapasitas Pemerintah, Pembangunan Berkelanjutan, Desa Genteng Kulon.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the capacity of the Genteng Kulon village government in supporting sustainable development. The formulation of the problem in this study is whether the current strengthening of the capacity of the Genteng Kulon Village government is able to support sustainable development. The method used is a qualitative approach with a case study method, which aims to deeply understand a phenomenon in a real context. The results of the study show that through the application of four indicators of the AGIL scheme and the application of three indicators of general system theory. The Genteng Kulon Village Government has succeeded in strengthening and increasing government capacity and supporting sustainable development. This success shows the importance of strengthening government capacity in creating community welfare and improving the quality of life in Genteng Kulon Village.*  
**Keywords:** Government Capacity, Sustainable Development, Genteng Kulon Village.

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fredoarmada1515@gmail.com](mailto:Fredoarmada1515@gmail.com)

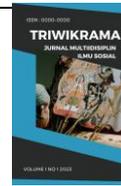


## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Konsep ini merujuk pada upaya pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan bukan hanya sekadar jargon dalam kampanye, melainkan menjadi sebuah keharusan dan prinsip yang harus diimplementasikan untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi di masa depan. (Lestarini, 2024). Sesuai data dari Global Sustainable Development Report, pada tahun 2023 Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pada tahun 2019 Indonesia berada pada posisi ke-102 dan kini pada tahun 2024 Indonesia berhasil berada di posisi ke-75. Indonesia memperlihatkan sebuah komitmen yang nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, indeks TPB/SDGs Indonesia mengalami peningkatan dari 64,2 % pada tahun 2019 menjadi 70,2 pada tahun 2023. Hal tersebut menandakan adanya perbaikan di berbagai sektor yang relevan dengan TPB/SDGs (SDGs Indonesia, 2024). Dari adanya peningkatan positif tersebut menandakan bahwa langkah-langkah strategi yang diambil, peningkatan tata kelola pemerintahan, implementasi berbagai program yang berbasis masyarakat, dan penguatan kapasitas pada berbagai tingkatan pemerintah, menunjukkan hasil yang positif. Namun, capaian tersebut juga menjadi sebuah pengingat terkait pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.

Desa memegang peran krusial dalam mendukung pencapaian DSDGs nasional, khususnya dalam isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan air bersih, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan cuaca. Penguatan kapasitas pemerintahan desa menjadi langkah strategis yang tidak hanya mempercepat tercapainya SDGs di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan indeks SDGs nasional di Indonesia. Pemerintahan desa sendiri merupakan instansi vital dalam proses perumusan kebijakan, pemerataan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Peran desa dalam mewujudkan pembangunan nasional semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang pada tahun 2014 yang mengakui otonomi desa, memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur wilayahnya sendiri. Sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, desa memainkan peran penting dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mempertegas hak desa dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa yang berperan sebagai eksekutif, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penguatan kapasitas pemerintahan desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemampuan desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa membutuhkan kapasitas yang mumpuni di berbagai bidang seperti tata kelola administrasi, perencanaan pembangunan, serta manajemen sumber daya manusia agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. Salah satu aspek kunci dalam upaya ini adalah pengembangan kompetensi teknis aparatur desa. Aparatur desa dituntut untuk memiliki keterampilan dalam perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, serta administrasi berbasis data. Keterampilan ini penting agar dana desa dapat digunakan secara tepat guna dan mendukung program-program pembangunan



berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak desa yang menghadapi tantangan terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya akses terhadap pelatihan yang dibutuhkan oleh perangkat desa. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintahan desa juga harus dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat, mengingat masyarakat desa berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan, sehingga keterlibatan aktif mereka menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di wilayah administrasi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk 1,78 juta jiwa. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan 189 desa. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang aktif dalam mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs) salah satu bentuknya yakni dalam kawasan Geopark Ijen Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi, bersama Emvitrust Indonesia yang berkolaborasi dengan Ijen Geopark Youth dan Geopark Ijen gelar Event Waste Management (EWM) atau Event manajemen sampah (Arifin, 2023). Selain itu upaya Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yakni dalam upaya pengentasan kemiskinan Pemkab Banyuwangi membuat program kanggo riko, untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk Pemkab Banyuwangi membuat program Banyuwangi Hijau dan masih banyak lagi. Program-program tersebut tidak dapat terealisasi dengan sukses tanpa adanya kerjasama baik dari pemerintah pusat, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa memiliki akses yang cukup dekat dengan masyarakat.

Desa Genteng Kulon merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 5 dusun. Desa Genteng Kulon merupakan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Genteng yaitu 19.435 jiwa. Hal tersebut menjadi sebuah potensi untuk menjadikan Desa Genteng Kulon menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat kecamatan Genteng, dikarenakan desa Genteng Kulon memiliki satu pasar yang cukup besar dan juga dua pusat perbelanjaan moderen (Herry Prasetyo, 2023). Selain pusat perbelanjaan modern pemerintah desa juga mengembangkan pusat UMKM yang terletak di RTH Maron. Desa Genteng Kulon memulai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2019 hingga saat ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga menjadikan Desa Genteng Kulon mampu meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 (arifianto, 2022). Namun, masih terdapat masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Desa Genteng Kulon diantaranya terdapat masyarakat yang tinggal dibantaran sungai dan lingkungan kurang teratur. Masalah yang kedua tentang pengelolaan sampah di karenakan Desa Genteng Kulon memiliki pasar yang cukup besar yang bisa menghasilkan sampah 3.5 ton setiap harinya dan 500 kilo berasal dari Ruang Terbuka Hijau. Hal tersebut menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah desa Genteng Kulon untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

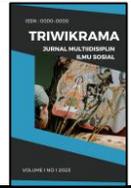
## TINJAUAN PUSTAKA

### Penguatan kapasitas

Penguatan kapasitas pemerintahan desa merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, serta perencanaan dan

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fredoarmada1515@gmail.com](mailto:Fredoarmada1515@gmail.com)



pelaksanaan pembangunan. Proses ini bertujuan agar individu, organisasi, dan sistem kelembagaan yang ada dapat beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan baik individu aparaturnya maupun kelembagaan daerah dapat tercapai. Selain itu, tujuan dari penguatan kapasitas ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Parjaman, Soedarmo, & Enas, 2019).

### **Pemerintahan**

Pemerintahan merupakan suatu sistem atau proses yang mengelola kekuasaan dan mengatur kehidupan masyarakat melalui lembaga yang memiliki wewenang sah. Tujuan utama pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintahan juga melibatkan pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik..

Dalam struktur pemerintahan, terdapat tiga elemen utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Legislatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sedangkan, yudikatif berfungsi untuk menjaga dan menegakkan undang-undang serta memberikan peradilan (Umboh, 2020).

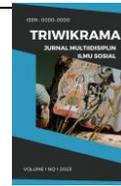
### **Pembangunan berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang dirancang untuk kepentingan generasi yang akan datang. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang. (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konsep ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan terhadap ekosistem. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga mendorong inklusi sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan solusi inovatif yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, pembangunan berkelanjutan bertujuan menciptakan dunia yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

### **Strategi**

Kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "strategos," yang merupakan gabungan dari "stratos" (tentara) dan "ego" (pemimpin). Secara umum, strategi adalah cara atau rencana untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan langkah-langkah yang telah dipertimbangkan dengan matang. Dalam konteks pemerintahan, strategi merujuk pada kerangka kerja yang dirancang untuk mencapai tujuan nasional melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang mencakup berbagai elemen, seperti perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, pemerintah harus mengidentifikasi prioritas pembangunan, merancang program kerja yang terukur, dan menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan membutuhkan kolaborasi antar lembaga negara, pemerintah daerah, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, strategi pemerintahan yang efektif harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui konsultasi publik atau musyawarah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya, strategi pemerintahan harus menekankan pada efisiensi dan keberlanjutan. Hal ini meliputi pengelolaan anggaran negara secara transparan,



pengurangan pemborosan, dan pengalokasian dana pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Strategi ini juga harus mencakup upaya pengembangan sumber daya manusia, melalui investasi di sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan masyarakat, guna menciptakan generasi yang terampil dan produktif.

### **Pemerintah Desa**

Pemerintahan adalah sistem pemerintahan yang berada pada tingkat desa, yang merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur administrasi negara. Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan suatu negara, yang berfungsi sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Struktur pemerintahan desa biasanya terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin eksekutif, perangkat desa sebagai pelaksana tugas administratif, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga legislatif sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan adat istiadat, budaya, dan potensi lokal yang dimiliki. Dalam hal ini, otonomi desa menjadi prinsip utama yang memungkinkan desa untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Otonomi ini didukung oleh alokasi dana desa, yang digunakan untuk mendanai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Fungsi pemerintahan desa meliputi berbagai bidang, seperti administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan desa, pembuatan peraturan desa, serta pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, pemerintahan desa perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta..

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks nyata. Studi kasus bertujuan mengungkap atau menggambarkan keunikan dari individu maupun kelompok tertentu. Metode ini juga menekankan pada analisis terhadap kasus-kasus tertentu dengan jumlah kejadian atau fenomena yang terbatas dalam suatu penelitian (ilhami, nurfajriani, arivian, sirojdj, & afgani, 2024). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sangat cocok diterapkan pada topik penelitian ini, yaitu Penguatan Kapasitas Pemerintahan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa Genteng Kulon. Lokasi yang dipilih berada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, dengan pusat kegiatan penelitian berlokasi di Balai Desa Genteng Kulon.

Proses penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode snowball sampling. Teknik ini diawali dengan memilih beberapa informan utama yang diyakini memiliki

\*Corresponding author

E-mail addresses: [Fredoarmada1515@gmail.com](mailto:Fredoarmada1515@gmail.com)



pengetahuan mendalam mengenai isu yang diteliti, seperti perangkat desa atau tokoh masyarakat. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan langsung secara intensif dengan responden. Teknik pengumpulan data melalui observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung aktivitas yang sedang terjadi. Dokumentasi dan literatur adalah metode pengumpulan data di mana peneliti menggunakan sumber-sumber tertulis atau tercatat, seperti buku, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat memperoleh data tambahan yang dapat memperkuat temuan penelitian dengan mengacu pada sumber-sumber yang sudah ada. Teknik ini juga digunakan untuk melengkapi informasi terbaru yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Unit analisis data merujuk pada satuan yang menjadi fokus penelitian, yang bisa berupa individu, kelompok, objek, atau peristiwa sosial, seperti aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan menetapkan kriteria responden, peneliti dapat menentukan siapa dan apa yang menjadi objek dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan kriteria kredibilitas melalui teknik pemeriksaan triangulasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bedasarkan skema Agil dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan teori sistem umum Niklas Luhmann peneliti telah melakukan observasi sebagai berikut:

#### **Adaptation (adaptasi )**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Genteng Kulon melakukan upaya adaptasi melalui implementasi Program Smart Kampung. Program Smart Kampung adalah konsep pengembangan desa secara terintegrasi yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program Smart Kampung merupakan salah satu bentuk inovasi terhadap perkembangan zaman.

#### **Goal Attainment (pencapaian tujuan)**

Pemerintah Desa Genteng kulon telah menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama yang harus dicapai dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek pada Tahun 2025 ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa terdapat Program Bantuan Langsung Tunai dan juga terdapat bantuan permodalan terkait pengembangan usaha masyarakat kurang mampu. Kedua program tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Genteng Kulon telah melaksanakan beberapa upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 ini.

#### **Intergration**

Bedasarkan hasil observasi Pemerintah Desa Genteng Kulon dalam setiap pelaksanaan program pembangunan selalu melibatkan masyarakat secara aktif. Melibatkannya bukan hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pelaksanaan program, masyarakat selalu dilibatkan sebagai tenaga kerja, seperti tukang dan pekerja lapangan dalam proyek pembangunan desa seperti pembangunan paving, pembangunan jalan dan juga pembelian bahan bahan dan kebutuhan proyek juga dipasok oleh pengusaha lokal dari Desa Genteng Kulon.

#### **Latency**

Berdasarkan hasil obeservasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Genteng Kulon melakukan kegiatan diskusi yang melibatkan pemerintah desa dengan masyarakat serta lembaga desa seperti karang taruna dan PKK yang menunjukkan bahwa di Desa Genteng

Kulon terdapat upaya aktif untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan sebuah keputusan.

### **Autopoietic**

Pemerintah Desa Genteng Kulon selalu membentuk lembaga dengan struktur tata kelola yang jelas untuk setiap lembaga yang ada di Desa Genteng Kulon.

### **Kontingensi Ganda**

Bedasarkan hasil observasi Pemerintah Desa Genteng Kulon seslalu mengadakan forum atau musyawah desa untuk memebahan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

### **Diferensiasi**

Bedasarkan hasil observasi Pemerintah Desa Genteng Kulon memeberi pelatian terhadap kebutuhan masyarakat seperti masyarakat yang sudah memepunyai usaha kecil diberi pelatian untuk mengebangkan usanya semetara masyarakat yang belum mempunyai usaha di beri pelatian dan permodalan.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian terkait Penguatan Kapasitas Pemrintahan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Tantangan dan Stratengi di Desa Genteng Kulon dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu dapat disimpulkan dengan mengacu pada indikator skema AGIL dan indikator teori sistem umum sebagai berikut:

#### **1. Adaptation (Adaptasi)**

Pemerintah Desa Genteng Kulon telah melewati berbagai tantangan dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Melalui program smart kampung dan upaya pembangunan infrastruktur desa kemampuan untuk berinovasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

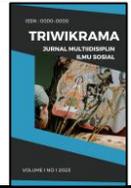
#### **2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan )**

Pencapaian tujuan dalam pengurangan kemiskian dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus Pemerintah Desa Genteng Kulon. Dengan melibatkan lembaga desa, dan memberikan pelatian serta modal kepada masyarakat, Pemerintah Desa Genteng Kulon telah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### **3. Integration (Integrasi)**

Pemerintah Desa Genteng Kulon menunjukkan integrasi yang cukup baik dalam kolaborasi antara Pemerintah Desa Genteng Kulon masyarakat, dan lebagal- lembaga terkait. Melalau kerja sama dalam program-program pemabangunan, seperti pengelolaan sampah dan pemeberdayaan umkm mewujudkan sinergi yang memeperkuat implementasi kebijakan dan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

#### **4. Latency (latensi)**



Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Genteng Kulon terhadap penanaman nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan semangat melayani telah menciptakan budaya kerja yang positif.

5. Autopoietic

Pemerintah Desa Genteng Kulon berperan sebagai sistem autopoietic yang mampu membentuk dan mempertahankan komponen-komponen utama yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, melalui kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pengembangan program-program inovatif seperti smart kampung. Pemerintah Desa Genteng Kulon membuktikan kemampuan untuk terus memperbaiki struktur dan mekanisme internal secara berkesinambungan.

6. Kontingensi Ganda

Penerapan konsep kontingensi ganda di Desa Genteng Kulon memperlihatkan pengalihan keputusan dan perumusan kebijakan Pemerintah Desa Genteng Kulon dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai lembaga di desa, seperti kemampuan lembaga dan keterlibatan masyarakat, serta faktor luar seperti perubahan sosial ekonomi dan lingkungan. Dengan mengelola perubahan ini Pemerintah Desa Genteng Kulon mampu merespon kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan menangani berbagai tantangan dengan lebih baik.

7. Diferensiasi

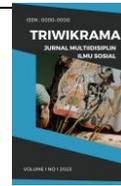
Penguatan kapasitas pemerintahan di Desa Genteng Kulon menunjukkan adanya proses diferensiasi fungsional dengan menunjukkan pembagian yang jelas dengan lembaga yang ada di Desa Genteng Kulon. Hubungan antara lembaga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh efektifitas koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga yang ada di Desa Genteng Kulon.

Secara keseluruhan penguatan kapasitas pemerintahan untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Genteng Kulon menunjukkan bahwa melalui penerapan empat indikator skema AGIL dan penerapan tiga indikator teori sistem umum. Pemerintah Desa Genteng Kulon berhasil menguatkan dan meningkatkan kapasitas pemerintahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di Desa Genteng Kulon.

## Saran

Untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan di Desa Genteng Kulon peneliti memberikan saran:

1. Pemerintah Desa Genteng Kulon diharapkan dapat memperkuat jaringan kerjasama dengan pihak akademisi ataupun dengan swasta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sektor layanan publik
2. Pemerintah Desa Genteng Kulon diharapkan mengadakan pendampingan seraca intensif terhadap masyarakat kurang mampu terhadap penerima bantuan modal usaha. Hal tersebut guna memastikan bantuan dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Genteng Kulon.
3. Mengadakan diskusi rutin misal setiap tiga bulan sekali antara pemerintah desa masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan terbukanya komunikasi semua pihak diharapkan dapat tercipta dukungan kolektif untuk program-program prioritas desa.



4. Buat badan pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja aparatur desa, seperti dengan memebentuk tim pengawasan dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan umpan balik mengenai pelayanan publik.

Pemerintah Desa diharapkan terus memeperkuat kapasitas pemerintahan melalui penikatan kopetensi dan pelatihan di bidang pengelolaan desa, keuangan, adminitrasi. Penguatan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

Abrahamson, M. (1978). *Functionalism*. London: Prentice Hall.

Alexander. (1983). *Teaching Reading*. Boston: Littele , Brown And Company.

Alwan, S., Muhammad, A., & Fahria. (2022). Penguatan Kapasitas Perancang Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Bubanehena Kabupaten Halmahera Barat . *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-10.

Amalia, L. (2024). Penguatan Kapasitas SDM Di Desa Jarin: Strategi Dan Implementasi. *Larisa Pengabdian Multidisiplin*, 1-5.

Arifianto, H. (2022, 4 26). *Liputan 6*. Diambil Kembali Dari Lipuan6.Com: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4947696/desa-genteng-kulon-banyuwangi-raih-nilai-tertinggi-di-ajang-ldm-2022>

Arifin, S. (2023, Juli Senin, 24). *Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Banyuwangi Dengan Event Waste Management*. Diambil kembali dari Ti Berita: <https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/f6819gyf9q/mewujudkan-pembangunan-berkelanjutan-di-banyuwangi-dengan-event-waste-management>

Ariyanti, N., Marleni, & Prasrihamni, M. (2022). Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I Di Sd Negeri 10 Palembang. *Pendidikan Dan Konseling*, 5.

Danar, O. R., Novita, A. A., Prakasa, Y., & Rachman, F. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 1-10.

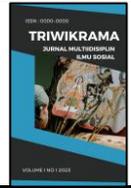
Esposito, J. (1996). *Ancaman Islam, Mitos Atau Realitas? Edisi Revisi: Menggugat Tesis Huntington*. Bandung: Mizan.

Herry Prasetyo, R. W. (2023, 2023 jumat,02). *jelajah ekonomi desa*. Diambil kembali dari jelajah ekonomi kontan: <https://jelajahaekonomi.kontan.co.id/ekonomidesa/news/kunci-kemandirian-desa-gentengkulon-pelayanan-dan-pemberdayaan-warga>

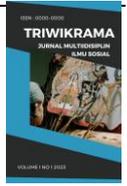
Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Arivian, M., Sirodj, R. A., & Afgani, M. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Wahana Pendidikan*, 5.

Jazilurrahman, Widat, F., Tohet, M., Murniati, & Nafi Ah, T. (2022). Implementasi Metode Bercerita Dalam Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.

Kingsley, D. (1959). *"The Myth of Functional Analysis*. dalam *American Sociological Review*.



- Lestari, A. H. (2024, Januari 10). *Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Contohnya*. Diambil kembali dari medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yNL1PMPb-pembangunan-berkelanjutan-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contohnya#:~:text=Pembangunan%20berkelanjutan%20adalah%20proses%20pembangunan,Apa%20itu%20Indonesia%20Emas%202045?>
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems (John Bednarz, Jr & Dirk Baecker (ed))*. Stand Ford University Press.
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District). *Jurnal Politico*, 8.
- Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas. (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global. *Management Review*, 3.
- Parsons, T. (1977). *The Evolution of Societies*. London: Prentice-Hall inc.
- Parsons. (1937). *The Structure of Social Action*. New York: Hill Book Company.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Parsons, t. (1966). *Societies Evolutionary and Comparative perspektive*. Engelwood Clift, NJ: Prentice Hall.
- Parsons, T. (1970). *Social Structure and Personality*. New York: The Free Press.
- Parsons, T. (1990). *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Parsons, T., & Edward A, S. (1951). *Toward A General Theory of Action: Theoretical Foundations for The Social Sciences*. Massachusetts: Harvard University Press.
- saleh, y., teguh, e., marlina, l., & seta, a. p. (2023). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*, 1-18.
- SDGs Indonesia. (2024, Maret 7). *Indonesia Usung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs di World EXPO 2025 OSAKA*. Diambil kembali dari SDGs Indonesia: <https://sdgs.bappenas.go.id/indonesia-usung-pembangunan-berkelanjutan-di-world-expo-2025-osaka/#:~:text=Berdasarkan%202023%20Global%20Sustainable%20Development,kepunahan%2C%E2%80%9D%20tutur%20Deputi%20Vivi>.
- Sujana, E., Suci, N. M., Yasa, I. P., & Dewi, N. T. (2020). Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDes Dan Pertanggung Jawaban Dana Desa. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1-12.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Edu Research*, 5.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Ekonomika Dan Manajemen*, 1.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- T, P. (1951). *Teori Struktural Fungsional*. Jakarta: Aksara Persada Pers.



- 
- Turner, J., & Maryanski, A. (1979). *Functionalism* (Penerjemahan: Anwar Efendi,dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umboh, C. J. (2020). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Lex Administratum*, 2.
- Wibawa , Lafafa; Amalia, Aisyah; Ramadoni, Adam Alfino; Huda, Muhammad Khoirul; Alimi, Fakhruddin; Larassaty, Ayu Lucy;. (2022). Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.